

BAB II

TRAFFIC Vietnam dan Permasalahan Perburuan Badak di Afrika Selatan

Secara garis besar, bab ini membahas mengenai kaitan perburuan TRAFFIC Vietnam dengan perburuan badak di Afrika Selatan, mulai dari alasan mengapa TRAFFIC yang dipilih dalam penelitian ini, mengapa Vietnam dapat menjadi pasar bagi cula badak, sejarah mengapa badak menjadi hewan yang banyak diburu, hingga bagaimana situasi di Afrika Selatan itu.

2.1 TRAFFIC sebagai NGO yang Hadir di Vietnam untuk Melawan Penyelundupan Cula Badak dari Afrika Selatan

Secara global, TRAFFIC memang telah memiliki banyak program mengenai hewan – hewan apa saja yang memerlukan pengawasan dan bantuan dalam menjaga perdagangannya tetap legal, mulai dari harimau, ikan hiu, gajah, dan tentu saja badak (Traffic n.d.). Dari semua hewan tersebut, badak yang merupakan fokus penelitian ini telah diteliti oleh TRAFFIC semenjak tahun 2000, dimana pada saat itu TRAFFIC adalah organisasi pertama yang mengungkap permasalahan mengenai badak tersebut (Traffic n.d.). TRAFFIC juga memiliki reputasi yang sangat baik di dalam kalangan organisasi yang fokus terhadap konservasi alam. Reputasi ini didapat dengan pembuktian TRAFFIC yang mampu berkomitmen penuh untuk menegakkan aturan dari CITES dan juga tidak lupa untuk mempromosikannya kepada publik (Worldwildlife n.d.). Dengan menjadi yang pertama mengidentifikasi permasalahan tersebut dan reputasi TRAFFIC

yang baik, ditambah dengan kasus badak yang mayoritas karena perdagangan yang ilegal, maka tidak ada alasan bagi TRAFFIC untuk diam saja mengenai isu ini dan menjadi contoh global dalam penanganan terhadap permasalahan badak ini.

Permasalahan yang mengakar di dalam masyarakat dan penegak hukum dari masing – masing negara juga ikut bermain dalam penyelundupan cula badak ini menjadi kerumitan tersendiri bagi TRAFFIC untuk melaksanakan tugasnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, motif penyelundupan ini adalah besar dipercaya karena motif ekonomi dan sosial baik dari pemburu badak, penyelundup, maupun konsumen akhir di Vietnam dimana hal tersebut berkaitan langsung dengan proses perdagangan satwa liar dimana TRAFFIC memiliki fokusnya pada isu tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di negara – negara lain dimana bukan menjadi fokus TRAFFIC, yang pada umumnya permasalahannya adalah mengenai konservasi badak yang tidak berjalan dengan baik. Dengan permasalahan seperti itu, hal inilah yang menjadikan TRAFFIC turun tangan langsung di Vietnam semenjak 2007, dimana angka perdagangan badak pada saat itu sedang mengalami kenaikan, selain itu juga hal tersebut berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap populasi badak di Afrika Selatan.

Sebagai sebuah NGO, tentu saja dalam usahanya untuk melaksanakan tugas di Vietnam, TRAFFIC bersandar pada visi dan misi organisasi. Aksi nyata di lapangan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diaplikasikan melalui 4 tahap / langkah yang selalu menjadi panduan organisasi ini dalam melaksanakan setiap fungsinya. Panduan tersebut disebut dengan *TRAFFIC's Pathway for Catalysing Change*, dimana hal yang pertama dilakukan TRAFFIC adalah

penelitian. Penelitian yang dilakukan TRAFFIC bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perdagangan satwa liar dan potensi kejahatan tersebut terjadi (Traffic n.d.). TRAFFIC juga menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai referensi untuk selalu terbuka dengan kemungkinan – kemungkinan baru yang terjadi di lapangan, fleksibel menggunakan metode dan strategi dalam menetapkan langkah selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kejahatan pada umumnya akan selalu mencari celah – celah yang ada agar apa yang mereka lakukan dapat terus berjalan. Selain itu, hasil penelitian TRAFFIC juga seringkali dapat ditemukan di organisasi – organisasi lain, dimana informasi dan data yang dipublikasikan digunakan untuk membantu organisasi - organisasi tersebut untuk melaksanakan programnya.

Setelah dilakukan penelitian, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh TRAFFIC adalah menganalisis hasil penelitian tersebut. TRAFFIC selalu mengumpulkan informasi dan data sebanyak – banyaknya, baik dari penelitian yang dilakukan oleh organisasi ini secara independen, organisasi lain, ataupun akademisi yang memang berkaitan dengan fokus TRAFFIC (Traffic n.d.). Hal ini memungkinkan TRAFFIC untuk selalu mendapatkan pengetahuan baru dari berbagai sudut pandang yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, hasil dari analisis tersebut akan dibentuk sebuah panduan. Panduan yang TRAFFIC miliki dimaksudkan sebagai pengetahuan, informasi, ataupun peringatan yang diberikan kepada publik mengenai isu tertentu (Traffic n.d.). Panduan ini tentu saja berdasar penelitian (poin sebelumnya) yang memang bisa dipercaya dan berdasarkan pada realita. Selain itu ditahap ini TRAFFIC juga

mencoba untuk memberikan regulasi ataupun standar yang sesuai dengan isu terkait.

Tahap terakhir yang dilakukan TRAFFIC tentu saja dengan memberikan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan terkait. Penjelasan mengenai poin tersebut adalah TRAFFIC selalu mencoba menjalin relasi dan melakukan komunikasi kepada pihak – pihak yang memang menjadi sasaran mereka, seperti pemerintah, korporasi / pebisnis, organisasi lain, dan masyarakat (Traffic n.d.). Selain itu TRAFFIC juga dibantu oleh WWF dan IUCN yang merupakan dua organisasi yang mencetuskan lahirnya TRAFFIC. Keseluruhan 4 langkah tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah:

Gambar 2.1

Langkah Panduan Kerja TRAFFIC



Sumber: (Traffic n.d.)

Selain itu TRAFFIC juga memiliki fokus terhadap setiap program yang dibuatnya. Pada dasarnya program yang dibuat TRAFFIC menysasar pemerintah, korporasi / pebisnis, dan masyarakat. Ada dua prinsip yang selalu menjadi dasar TRAFFIC dalam menjalankan fungsinya, yaitu *Action to enhance systems for sustainable, legal wildlife trade* dan *Action to enhance responses to wildlife crime and illegal*

trade (Traffic n.d.). Prinsip ini tidak lain menunjukkan bahwa apa yang menjadi fokus TRAFFIC bukanlah melarang perdagangan satwa liar ataupun konsumsi produk satwa liar. Lebih dari itu, apa yang ingin dipromosikan TRAFFIC secara umum dan kepada publik Vietnam adalah bagaimana dapat terwujudnya perdagangan dan konsumsi dari produk satwa liar yang bertanggung jawab dan memperhatikan *sustainability*.

Dalam dua prinsip tersebut juga, TRAFFIC mempraktikkannya dengan empat cara, dimana yang pertama adalah *co-operation*. *Co-operation* di sini dijelaskan sebagai sebuah tindakan kolektif bersama pemerintah untuk yang berdasar dari konvensi atau perjanjian internasional untuk mempertegas sikap negara yang berujung kepada tereduksinya masyarakat (Traffic n.d.). Selanjutnya adalah *regulation*, dimana merupakan Implementasi peraturan dan penegakan hukum yang baik oleh pemerintah (Traffic n.d.). Ketiga adalah *sourcing*, yang berarti mengedukasi pedagang / pebisnis satwa liar agar selalui memperhatikan aspek *sustainability* dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan mereka (Traffic n.d.). Keempat atau yang terakhir adalah *purchasing*, dimana berarti berfungsi mengedukasi kepada konsumen dari perdagangan satwa liar agar memilih barang yang legal yang tentu saja bersumber dari pedagang yang legal (Traffic n.d.).

2.2 Keterlibatan Vietnam dalam Tingginya Perburuan Cula Badak di Afrika Selatan

Perburuan ilegal badak untuk diambil cularnya dianggap CITES sebagai salah satu kejahatan lingkungan / satwa liar yang paling terstruktur yang pernah

dihadapi oleh CITES (EIA 2013). Permintaan terhadap cula badak dari pasar, khususnya negara – negara Asia, terutama Vietnam (yang menjadi problematika utama penelitian ini) bisa dikatakan berada di angka yang tinggi sehingga terus memicu pedagang untuk selalu memenuhi permintaan tersebut. Permintaan cula badak yang tinggi tidak lepas dari kepercayaan yang ada di masyarakat Vietnam bahwa cula badak dapat menjadi obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti demam dan kanker. Selain itu, cula badak juga dipercaya dapat menjadi penawar ketika seseorang hilang kesadaran karena mengonsumsi alkohol, hingga dipercaya dapat menjadi obat yang meningkatkan vitalitas bagi laki – laki (Sehmi 2017). Padahal tidak ada bukti secara ilmiah mengenai manfaat cula badak untuk menyembuhkan hal – hal tersebut.

Tingginya konsumsi cula badak yang bahkan digunakan secara harian adalah dapat menjadikan siklus perdagangannya seolah tidak memiliki ujung. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika Vietnam mengalami kelangkaan suplai cula badak dikarenakan permintaan yang tinggi dan suplai yang belum memadai. Situasi tersebut dapat menjadikan harga cula badak menjadi tinggi. Situasi ini menyebabkan hanya orang – orang yang kaya saja yang dapat membeli cula badak tersebut, alhasil memunculkan persepsi baru bahwa cula badak adalah simbol kesejahteraan ataupun kekuasaan bagi masyarakat Vietnam, yang tentu saja banyak masyarakat yang ingin meraih gelar tersebut sehingga menjadi faktor lain (selain untuk obat tradisional) akan kenaikan permintaan cula badak.

Kasus tingginya permintaan cula badak dari Vietnam dicurigai tidak lepas dari campur tangan secara sengaja oleh orang – orang Vietnam yang menjadi pengepul cula badak tersebut. Mereka ikut andil dalam menentukan jumlah

permintaan dari Vietnam, menjaga harga pasar, dan menyebarkan cula – cula badak tersebut melalui pasar tradisional (EIA 2013). Status Vietnam dalam menjadi pasar utama cula badak tersebut juga terbukti dengan keterlibatan para Diplomat Vietnam yang berada di Afrika Selatan. Pertama kalinya ada bukti bawah terjadi keterlibatan oleh personel dari Kedutaan Besar Vietnam adalah pada tahun 2006, ketika salah satu personel yang bernama Khan Toan Nguyen ditangkap dengan barang bukti berupa dua buah cula badak, perhiasan, dan uang tunai (Milliken & Shaw 2012). Selain itu, keterlibatan mereka dalam kasus ini diketahui ketika pernah ada rekaman yang memuat proses transaksi cula badak antara pegawai kedutaan besar Vietnam dengan para pemburu ilegal (EIA 2013). Namun, para personel dari Kedutaan Besar Vietnam tersebut tidak bisa dihukum oleh Pemerintah Afrika Selatan karena kepemilikan paspor diplomatik, meskipun imunitas mereka ternyata disalahgunakan, termasuk menggunakan tas diplomatik untuk mengirim cula badak ke negara asal mereka.

Keterlibatan Vietnam di Afrika Selatan tidak hanya berhenti pada personel kedutaan besar saja. Masyarakat Vietnam juga berkontribusi langsung dalam perburuan badak di Afrika Selatan. Tanpa keterlibatan masyarakat Vietnam pada dasarnya angka perburuan oleh masyarakat lokal sudah bisa dikatakan tinggi. Faktor terbesar dalam tingginya angka perburuan liar badak oleh masyarakat Afrika Selatan didasari oleh tingginya angka kemiskinan yang ada di negara tersebut (Loibooki et al. 2009). Tidak hanya angka kemiskinan yang tinggi, namun kesulitan dan kurangnya akses untuk dapat memperbaiki status ekonomi juga semakin mempersulit keadaan tersebut (Anti-Poaching Intelligence Group 2012).

Terlibatnya masyarakat Vietnam tersebut dalam perburuan di Afrika Selatan dimulai dari kedatangan mereka ke Afrika Selatan yang berbeda daripada pemburu dari negara lain pada umumnya. Ketika para pemburu lain datang melalui jalur resmi, seperti jadwal tahunan yang memang ditentukan oleh Pemerintah Afrika Selatan, pemburu Vietnam tersebut datang melalui koneksi atau sindikat mereka masing – masing, dan biasanya mereka memiliki koneksi kepada pemburu – pemburu profesional sebagai pelatih ataupun para pemilik tempat konservasi milik swasta yang dapat membantu mereka (IFAW 2016). Sindikat ini juga tidak jarang untuk menggunakan tenaga masyarakat lokal mengambil kesempatan dengan tingginya angka kemiskinan di Afrika Selatan. Tercatat kisaran upah bagi tenaga lokal Afrika Selatan tersebut bisa mencapai US\$4.000 untuk setiap ekor badak yang berhasil mereka bunuh, dimana nominal tersebut diperkirakan mencapai 300% dari upah rata – rata jika mereka bekerja sebagai buruh di area pertanian (banyak terdapat di sekitar area konservasi) (Sommerville 2012). Selain adanya masyarakat Vietnam dan warga asli Afrika Selatan yang bergerak di dalam sindikat tersebut, aktor lain yang berada di area sekitar taman konservasi juga tidak lepas dari incaran sindikat ini. Tercatat pernah dilaporkan adanya keterlibatan pemandu wisata, mantan petinggi taman nasional, dan dokter hewan yang pernah sampai ke pengadilan karena tuduhan keterlibatan dalam perburuan ilegal badak dan penyelundupan cula badak tersebut (Sommerville 2012).

Perburuan yang terjadi sebenarnya tidak selalu dilakukan secara ilegal, melainkan ada juga yang patuh terhadap peraturan di tempat konservasi masing – masing di tempat perburuan dilakukan. Permasalahan muncul karena perburuan

tersebut dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh di semua konservasi swasta yang ada, dari sekitar tahun 2009 – 2012 (Milliken & Shaw 2012). Apa yang dilakukan oleh pemburu dari Vietnam tersebut menjadikan Afrika Selatan memberi sebutan khusus kepada mereka, yaitu *pseudo – hunting*. Istilah ini memiliki makna dimana perburuan yang dilakukan pemburu Vietnam tersebut, bukan mengarah kepada untuk membuktikan kemampuan berburu mereka, melainkan semata – mata untuk kebutuhan komersil (EIA 2013). Hal ini tentu saja menjadikan kondisi semakin buruk bagi badak putih maupun badak hitam, dimana status mereka yang semenjak 1996 (badak hitam) dan 2002 (badak putih) hingga sekarang masuk dalam *IUCN Red List* seperti yang dapat dilihat di gambar berikut:

Gambar 2.2

Status IUCN Red List Badak Hitam



Sumber: (IUCNredlist n.d.)

Gambar 2.3

Status IUCN Red List Badak Putih



Sumber: (IUCNredlist n.d.)

Status tersebut didapatkan atas dasar jumlah populasi badak yang ada di alam liar pada waktu terkait dan diperbandingkan dengan jumlah populasi spesies tersebut

ketika pertama kali tercatat, selain itu presentase tumbuh atau berkurangnya spesies juga menjadi variabel dalam penetapan status tersebut (IUCNredlist n.d.)

Dalam mengimbangi tingginya perburuan badak tersebut, tentu saja harus dibarengi dengan usaha untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kegiatan perburuan, terutama yang dilakukan oleh masyarakat Vietnam. Pada tahun 2012 *Minister for Water and Environmental Affairs* dari Afrika Selatan mengumumkan peraturan bahwa telah melakukan suspensi atau larangan berburu bagi semua pemburu yang berasal dari Vietnam (Milliken & Shaw 2012). Tindakan ini diambil sebagai respon dari tingginya pemburu Vietnam yang berada di Afrika Selatan pada tahun tersebut. Tercatat dari tahun 2009 – 2012 setidaknya ada 320 pemburu dari Vietnam dan sekitar 300 buah cula badak telah diekspor ke Vietnam (IFAW 2016). Secara tidak langsung yang menjadikan harga dari cula badak menjadi tinggi, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa dengan stok cula badak melimpah yang mereka miliki, akhirnya mereka mampu mengatur stok cula badak yang ada di pasaran dan pada akhirnya mereka dapat memainkan harga dari cula badak tersebut.

Setelah larangan yang dikeluarkan oleh *Minister for Water and Environmental Affairs* pada tahun 2012 tersebut, memang jumlah pemburu yang berasal dari Vietnam berkurang, namun Afrika Selatan menemukan angka baru bahwa ada pemburu dari negara lain yang semenjak saat itu angka izinnya meningkat, yaitu Republik Ceko. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mengelabui larangan berburu bagi orang berkebangsaan Vietnam, agar bisnis dari sindikat tersebut tetap bisa berjalan normal. Dari gambaran kecil tersebut tentu menunjukkan bahwa pada dasarnya masalah yang mengancam populasi badak

tersebut bukanlah hanya tentang perburuan ilegal, namun juga mengenai konsumen yang berada di Vietnam yang terus berusaha untuk menemukan cara agar keinginan mereka tercapai.

2.3 *Trophy Hunting* dan Perburuan Satwa Liar di Afrika Selatan

Trophy hunting pada dasarnya adalah sebuah bentuk lomba berburu dimana para pemburu memiliki tujuan untuk mendapatkan hewan tertentu atau bagian tubuh dari suatu hewan sebagai simbol kemenangan dalam kegiatan lomba tersebut (IFAW 2016). *Trophy hunting* merupakan kegiatan yang legal dikarenakan memiliki aturan yang jelas, dimana menjadikannya berbeda dengan perburuan pada umumnya meskipun melibatkan pemburu dan hewan buruan. Mengenai *trophy hunting*, pada dasarnya bukanlah sebuah hal baru dalam dunia satwa liar, bukanlah sebuah metode baru yang diciptakan untuk mampu mengelabui hukum, melainkan hal tersebut sudah terjadi secara turun – temurun di Afrika yang menjadikannya sudah tidak asing lagi.

Pada masa kolonial (Belanda dan Inggris), penjajah seringkali menggunakan kegiatan berburu badak tersebut untuk pemanfaatan dagingnya dan sebagai salah satu sarana olahraga (Sas-Rolfes 2011). Hal ini terus berlangsung hingga di akhir tahun 1800-an angka populasi badak hanya mencapai puluhan ekor (Sas-Rolfes 2011). Untungnya, pada tahun 1895 ada kesadaran dari Afrika Selatan yang kala itu masih di bawah jajahan Inggris, menginisiasi untuk membentuk area konservasi badak, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun pribadi / swasta. Langkah ini ternyata berhasil menaikkan angka populasi badak, dimana tercatat pada tahun 1960-an populasi badak meningkat menjadi sekitar

800-an ekor (Sas-Rolfes 2011). Beberapa tahun berikutnya sekitar 1968 akhirnya ditemukan cara berburu yang lebih bersahabat terhadap populasi badak yang dikenal dengan *trophy hunting*. Dimana kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga populasi badak, sekaligus tetap mengakomodir kegiatan berburu badak yang pada saat itu menjadi kegiatan yang populer. *Trophy hunting* kerap diadakan di konservasi milik pribadi / swasta yang pada saat itu sangat menjamur (Sas-Rolfes 2011). Meskipun begitu, ternyata kegiatan ini tidak berhasil untuk mencapai tujuannya. Setelah berjalan cukup lama, *trophy hunting* yang semakin populer di kalangan pemilik konservasi swasta, justru menjadikan fakta di lapangan berbicara sebaliknya.

Pada tahun 1980, ditemukan banyak sekali taman konservasi milik swasta tersebut yang mengantri untuk meminta suplai badak dari konservasi milik pemerintah untuk ditampung di tempat mereka, yang ternyata ketika diteliti lebih jauh, hal tersebut hanya untuk kepentingan *trophy hunting* tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk mengembangbiakkan (sebagai tujuan utama konservasi) (Sas-Rolfes 2011). Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang berlaku di Afrika Selatan pada saat itu (1982), dimana Pemerintah Afrika Selatan memberlakukan insentif ataupun subsidi bagi pihak swasta yang ingin berniat mengkonservasi badak di area mereka sejumlah R1.000 (US\$ 80). Masih di tahun yang sama, di sisi lain bisnis *trophy hunting* dapat menghasilkan R6.000 (US\$480) dari satu ekor badak. Hal ini tentu saja memotivasi pihak swasta tersebut untuk berlomba – lomba dengan sesegera mungkin menjual badak yang mereka dapatkan dari pemerintah dengan kemungkinan margin keuntungan hingga 600% (Sas-Rolfes 2011).

Tingginya keuntungan dengan melaksanakan *trophy hunting* pada masa itu masih tercermin hingga dekade – dekade berikutnya. Adanya kepentingan untuk pemenuhan permintaan cula badak dari Vietnam tentu juga tidak bisa dilepaskan dari hal ini. seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, keterlibatan masyarakat Vietnam dalam industri perburuan juga termasuk *trophy hunting* yang akhirnya berubah menjadi kepentingan komersi (*pseudo – hunting*) menjadikan mereka dianggap sebagai faktor utama tingginya perburuan badak di Afrika (Milliken & Shaw 2012). Kenaikan harga badak hasil dari *trophy hunting* juga tidak lepas menjadi faktor lain dari masih maraknya kegiatan ini. Badak bisa dikatakan adalah primadona bagi para pemburu, dikarenakan betapa berharganya cula badak tersebut untuk dapat dijual dibandingkan dengan hewan lain di Afrika yang juga sering menjadi sasaran *trophy hunting*, seperti yang dilaporkan FAO pada tahun 2009 berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Harga Hewan Buruan di Afrika

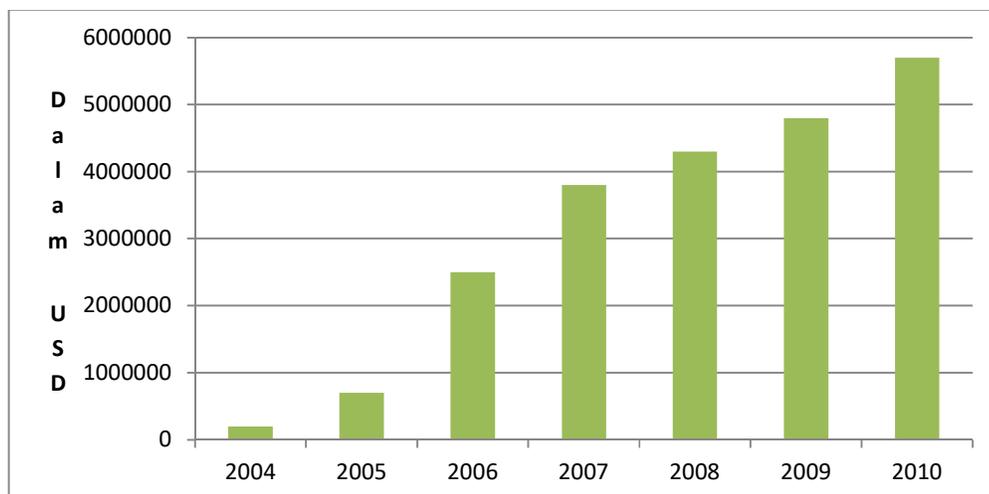
Hewan	Harga (USD)	Status Konservasi (IUCN)
Kerbau Afrika	\$12,500 - \$17,000	<i>Least Concern</i>
Macan Tutul	\$15,000 - \$35,000	<i>Near Threatened</i>
Singa	\$8,500 - \$35,000	<i>Vulnerable</i>
Gajah	\$25,000 - \$60,000	<i>Vulnerable</i>
Badak (putih)	\$125,000 +	<i>Near Threatened</i>

Sumber: (IFAW 2016)

Trophy hunting tersebut memang menjadikan status hewan liar yang diburu tersebut menjadi legal. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kasus cula badak ini, pada saat cula badak tersebut sampai di Vietnam, statusnya sudah ilegal, dikarenakan penyelundupan yang terjadi. Tingginya biaya *trophy hunting* yang dikabarkan mencapai angka US\$81.000 – US\$100.000 tidak menjadi halangan bagi para pemburu Vietnam untuk ikut serta dalam kegiatan *trophy hunting* (IFAW 2016). Hal ini dikarenakan tingginya harga cula badak di Vietnam yang mampu menutup dan masih menghasilkan laba dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan mereka untuk berburu (merujuk pada harga cula badak US\$400.000 yang sudah disampaikan sebelumnya). Tingginya keuntungan bagi pemburu Vietnam tersebut bisa dilihat di dalam grafik berikut:

Grafik 2.1

Perkiraan Hasil *Trophy Hunting* yang Didapatkan oleh Pemburu dari Vietnam



Sumber: (Milliken & Shaw 2012)

Tingginya pendapatan yang dihasilkan oleh para pemburu Vietnam dari hasil *trophy hunting* menjadi motivasi mereka untuk melakukan penyelundupan agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Situasi ini tentu saja dapat semakin mengancam bagi populasi badak. *Trophy hunting* yang awalnya ditujukan agar dapat menjadi jalan tengah untuk solusi berkurangnya populasi badak, justru malah menjadi kegiatan yang semakin mengancam populasi badak.

2.4 Ekspor Cula Badak dari Afrika Selatan ke Vietnam

Vietnam yang telah menjadi negara anggota CITES semenjak tahun 1994, pada dasarnya telah mengimplmentasikan melalui *Decree 82/2006/ND-CP on Management of Export, Import, Re-export, Introduction from the Sea, Transit, Breeding, Rearing and Artificial Propagation of Endangered Species of Precious and Rare Wild Fauna and Flora* pada 10 Agustus 2006 (Milliken & Shaw 2012). Aturan tersebut secara umum mengacu kepada peraturan CITES mengenai *Appendix* yang mengatur mengenai regulasi perdagangan satwa liar, sehingga semua hewan yang berstatus *Appendix I* akan selalu membutuhkan izin dari CITES untuk transaksi ekspor maupun impor. Mengacu pada status badak hitam dan putih seperti yang disampaikan *IUCN Red List*, hal ini menjadikan badak hitam dan badak putih masuk dalam kategori *Appendix I* CITES. Adanya dasar hukum tersebut menjadikan proses ekspor – impor dari cula badak ketat dan benar – benar dibawah pantauan dari CITES dan negara yang bersangkutan. Vietnam secara domestik juga memiliki beberapa aturan dan tahapan yang harus dilakukan oleh para importir cula badak tersebut yang harus dipenuhi, antara lain yaitu, izin dari CITES di negara asal barang terkait, izin berburu dari otoritas resmi negara

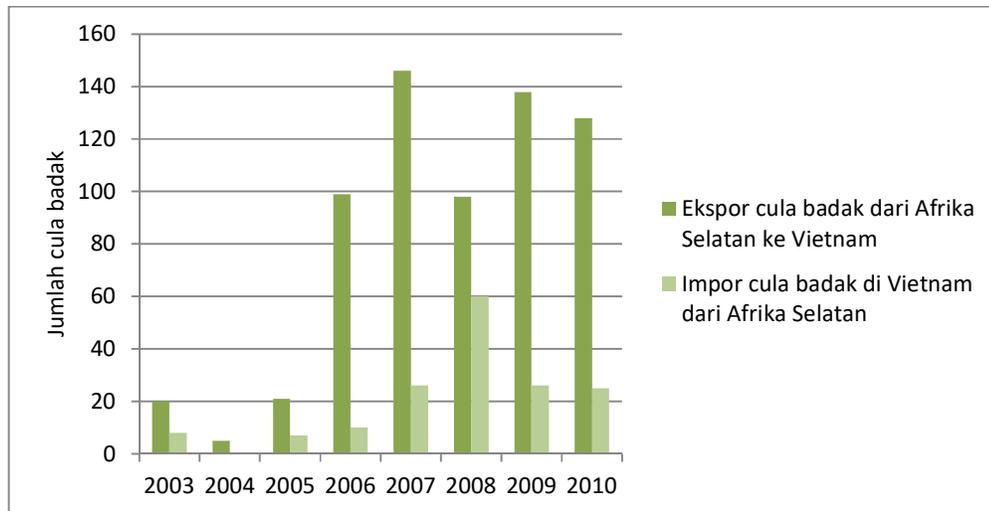
asal barang terkait, salinan paspor Vietnam yang membuktikan bahwa importir tersebut pernah tinggal di negara asal barang terkait, serta izin menetap yang dikeluarkan dari negara asal barang terkait (Tung 2011).

Mengenai ekspor cula badak dari Afrika Selatan ke Vietnam, hal yang harus dibicarakan adalah ketika pertama kali Afrika Selatan melalui CITES memberikan izin untuk melakukan ekspor cula badak ke Vietnam pada tahun 2003. Izin tersebut berlaku untuk 9 cula badak hasil dari *trophy hunting* dan 2 dari hasil buruan, dari total 91 izin yang dikeluarkan oleh CITES pada tahun tersebut. Tahun berikutnya, CITES mencatat ada peningkatan sejumlah 3 izin lagi untuk hasil dari *trophy hunting* yang diekspor ke Vietnam dari total 111 izin yang dikeluarkan di tahun tersebut. Praktis, semenjak permulaan tersebut, tren ekspor cula badak dan izin CITES, terutama yang bertujuan ke Vietnam selalu meningkat dan bertambah dari tahun ke tahun, terutama mulai tahun 2006 (Milliken & Shaw 2012).

Meskipun ekspor tersebut merupakan ekspor legal, dikarenakan mendapatkan izin dari Afrika Selatan melalui CITES, namun ditemukan bahwa angka ekspor ke Vietnam dan impor di Vietnam akan komoditi cula badak dari Afrika Selatan tidak menemui titik keseimbangan seperti yang tertera berikut. Hal ini tentu saja menjadi penguat akan adanya praktik penyelundupan cula badak yang diperdagangkan dari Afrika Selatan ke Vietnam. Perbedaan jumlah ekspor cula badak dari Afrika Selatan dan jumlah impor cula badak di Vietnam dalam dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.2

Kesenjangan Jumlah Ekspor dan Impor Cula Badak



Sumber: (Milliken & Shaw 2012)

Berdasar grafik tersebut, muncul tanda tanya besar ketika angka tersebut tidak memiliki keseimbangan dan justru memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Padahal bisa dikatakan cula badak yang dikirim merupakan cula badak yang legal dan seharusnya cula badak tersebut tidak menemui masalah ketika harus masuk ke Vietnam. Ketika sesuatu yang tercatat-pun ternyata masih menemui kejanggalan, bisa dikatakan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak tercatat pasti akan lebih mengerikan. Angka – angka di atas tentu saja tidak bisa mewakili bentuk peristiwa yang sama, yaitu ekspor dan impor cula badak yang dilakukan secara ilegal dan tidak tercatat oleh CITES.

Salah satu contoh adalah ketika pada tahun 2003 – 2010 menurut CITES ada 657 cula badak yang diekspor secara legal dari Afrika Selatan ke Vietnam sebagai hasil dari *trophy hunting*, namun ternyata Vietnam hanya menerima 170

cula badak yang diimpor secara legal ke negara mereka, hal ini berarti sekitar 74% impor cula badak tersebut berstatus ilegal dan tentu saja merugikan negara dari sektor pemasukan pajak (Milliken & Shaw 2012). Perkiraan keuntungan bagi para penyelundup jika menggunakan perkiraan harga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu di latar belakang adalah \$400.000 setiap culanya, maka uang yang didapatkan oleh para penyelundup ini diperkirakan bisa mencapai \$194.000.000 dari tahun 2003 – 2010.